

Indikator Kinerja Utama

Instansi : Biro Hukum Setda Prov. Kalsel

Tugas SKPD : Menyiapkan bahan pembinaan perumusan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum, penanganan sengketa hukum, evaluasi hukum daerah Kabupaten/Kota, pemasyarakatan HAM serta dokumentasi hukum

Fungsi SKPD : a. Penyiapan Bahan Koordinasi Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur Dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum.
 b. Penyiapan Bahan Pertimbangan Dan Bantuan Hukum Kepada Unsur Pemerintah Daerah Dan Penanganan Sengketa Hukum.
 c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Dan Administrasi Kepegawaian Biro.
 d. Penyiapan Bahan Evaluasi Dan Pembatalan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemasyarakatan HAM.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator Dan Cara Penghitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan terhadap stake holder dalam hal Produk Hukum Daerah Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan	Tingkat Indeks kepuasan pelayanan yang telah diberikan	<p>Makna indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum sebagai fungsi penunjang pemerintahan yang membidangi hukum sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada seluruh <i>stake holder</i> yang memerlukan, pengharmonisasian, penelaahan, pengkajian dan evaluasi atas segala produk hukum daerah prov kalsel yang menghambat iklim investasi, menghambat pelayanan publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya terhadap pelaku kegiatan usaha tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bertentangan dengan kepentingan umum. <p>Alasan pemilihan :</p> <p>Untuk terwujudnya kinerja yang terukur yang mendukung fungsi penunjang pemerintahan yang membidangi hukum yang selalu berkaitan dengan ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya <i>stake holder</i> mendapat pelayanan prima dalam menjalankan roda pemerintahan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey kepuasan layanan Biro Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Perundang-Undangan - Kabag. Evaluasi dan Dokumentasi Hukum - <i>Stake Holder</i> Pemrakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuisisioner
2	Tingkat penanganan masalah hukum di lingkungan Pemprov. Kalsel	Persentase tingkat kemenangan pada setiap proses peradilan	<p>Makna indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tingkat kemenangan dalam gugatan/perkara di pengadilan yang diselesaikan merupakan hasil pencapaian yang baik dalam hal menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan proses dipradilan. <p>Alasan pemilihan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM - Ksb. Perlindungan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum - <i>Stake Holder</i>

			<p>Merupakan bentuk adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan guna menghadapi ataupun mengatasi permasalahan hukum yang terdapat pada <i>stake holder</i> dalam hal peradilan tata usaha negara maupun perdata.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan/perkara yang dimenangkan dalam tahapan-tahapan proses peradilan dibanding jumlah tahapan proses peradilan dikali 100% 		
3	Meningkatkan kepuasan pelayanan bantuan hukum.	Tingkat indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum yang diberikan	<p>Makna Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengukur kepuasan stake holder sebagai pengguna pelayanan bantuan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum atas hasil survei kepuasan stake holder yang disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Melalui survei kepuasan stake holder yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan bantuan hukum. Karena pelayanan bantuan hukum merupakan <i>leading sector</i> dalam penanganan gugatan/perkara yang di hadapi dalam menempuh upaya hukum.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survey kepuasan pelayanan bantuan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuisisioner - <i>Stake Holder</i>
4	Diakuinya provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Provinsi Peduli HAM	Diraihnya Predikat sebagai Provinsi Peduli HAM	<p>Makna Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terinventarisasinya data dan dokumen kabupaten/kota di provinsi kalsel yang melaksanakan penilaian kabupaten/kota peduli HAM <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Merupakan keseriusan pemerintah provinsi kalimantan selatan yang melaksanakan penilaian kabupaten/kota peduli HAM dalam hal P5 HAM (pengormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diraihnya penghargaan sebagai Provinsi Kalimantan Selatan peduli HAM yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kanwilcumham di Kalsel - Ksb. Sengketa Hukum dan HAM - Data Dan Dokumen Di 13 (tiga belas) Kabupaten/ Kota Peduli HAM Di Provinsi Kalsel

Indikator Kinerja Utama (Eselon III)

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Mempunyai Tugas Melaksanakan Pemberian Bantuan Dan Perlindungan Hukum Kepada Unsur-Unsur Pemerintah Daerah, Penanganan Sengketa Hukum Dan Pemasarakatan Hak Asasi Manusia, Serta Melaksanakan Kegiatan Tata Usaha Biro.

(KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Penanganan Perkara Litigasi Dan Non Litigasi Di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalsel	- Persentase Penanganan Litigasi Kepada Unsur-Unsur Pemerintah Di Prov. Kalsel Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan gugatan/perkara di pengadilan yang masuk/dikuasakan telah dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan di pengadilan dan diselesaikan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Ada empat tahapan pada setiap perkara/gugatan yang masuk/dikuasakan di menangkan. apabila pada tingkat pertama menang dan pihak lawan tidak banding. Jika pihak lawan banding maka akan dilanjutkan pada tingkat banding sampai di menangkan, dan seterusnya sampai pada tingkat peninjauan kembali (PK) inckrah.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan yang masuk/dikuasakan dimenangkan pada proses perkara di pengadilan dibanding Jumlah proses gugatan/perkara yang masuk/dikuasakan di pengadilan dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan Ham 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Surat Kuasa yang diterima/ditangani
		- Persentase Penanganan Penyelesaian Non Litigasi Di Lingkungan Pemprov. Kalimantan Selatan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan telah dilaksanakan sesuai sengketa yang dilaporkan kepada pemprov. Kalsel <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Penanganan sengketa hukum diluar pengadilan ditangani dan difasilitasi sesuai permasalahannya.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara/gugatan/aduan ditindak lanjuti di sampaikan kepada Pemprov. Kalsel dibanding Jumlah perkara/gugatan/aduan yang masuk dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah somasi atau Pengaduan.

2	Terpenuhinya bantuan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan di Provinsi Kalsel	- Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan atas permohonan bantuan hukum masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai ketersediaan dana. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas pemerataan keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah permohonan yang dapat ditindaklanjuti dibanding Jumlah permohonan bantuan hukum masyarakat miskin melalui OBH kepada Pemprov. Kalsel dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan Ham 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Permohonan bantuan Hukum masyarakat miskin
3	Terwujudnya Kab/Kota yang mengimplementasikan RANHAM dengan baik	- Persentase Kab/Kota yang diikutkan dalam penilaian Kab/Kota peduli HAM	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan penilaian Kab/kota peduli HAM, sesuai dengan Kab/kota yang memasukan data penilaian <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Penilaian Kab/kota peduli HAM sesuai dengan target waktu penilaian</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kab/Kota yang diikutkan dalam penilaian kriteria Kab/Kota peduli HAM dibanding dengan jumlah Kab/Kota di Prov. Kalsel kemudian dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan Ham 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Masuk dari Kab/Kota - Peraturan terkait HAM - Produk Hukum Kab/Kota
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum	- Nilai sakip Biro Hukum	<p>Makna Indikator:</p> <p>Dengan diketahuinya nilai SAKIP Biro Hukum, maka sejauhmana kinerja Biro Hukum dapat terukur.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Merupakan kewajiban SKPD meningkatkan kinerja dimana kinerja dapat terlihat dari nilai SAKIP yang diperoleh</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <p>Realisasi nilai SAKIP Tahun N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan Ham - Ksb. Tata Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Isnpektorat
5	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Biro Hukum	<p>Makna Indikator:</p> <p>Setiap aset yang ada pada Biro harus tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Dengan adanya indikator tersebut dimaksudkan terpenuhinya pencatatan aset pada Biro Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM - Ksb. Tata Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Inventaris Barang

			Cara Penghitungan Indikator: Jumlah aset yang dicatat dibanding jumlah aset yang dimiliki.		
--	--	--	--	--	--

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan Evaluasi Dan Fasilitasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Serta Menyusun Rencana Kebijakan, Menyusun Program, Mengatur, Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Dan Pengolahan Dokumentasi Dan Publikasi Produk Hukum.

(KEPALA BAGAIAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI HUKUM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Kesesuaian produk hukum pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang sesuai ketentuan perundang-undangan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda dan Raperda kab/kota yang perlu dievaluasi untuk tata kelola yang baik, dengan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya pelaku usaha, tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan serta berbenturan dengan kepentingan umum. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Keberhasilan dalam mengevaluasi dan fasilitasi merupakan wujud tata kelola peraturan perundang-undangan yang baik khususnya di daerah kab/kota provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk hukum Perda/Raperda dan Peraturan Bupati/walikota yang proses pembuatannya pada tahun berjalan yang berhasil dievaluasi dan difasilitasi dibanding dengan jumlah permohonan evaluasi dan fasilitasi Pembuatan Perda/Raperda dan Peraturan Bupati/Walikota wilayah I dan II yang proses pembuatannya pada tahun berjalan, yang masuk ke Biro Hukum kemudian dikali 100 %. 	- Kabag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda surat masuk/keluar Bagian hukum - Buku Agenda Raperda dan Perda Kab/Kota - Buku Agenda Keputusan/Peraturan Bupati/ Walikota - Bukti permohonan dan hasil evaluasi Gubernur
2.	Inventarisasi Peraturan Daerah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk Hukum Kabupaten/Kota Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Prov. Kalsel perlu dilakukan pengawasan secara kontinu dengan cara terus di inventarisasi dan tercatat dalam registrasi evaluasi dan fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalsel <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Dengan adanya indikator tersebut dimaksudkan agar seluruh produk hukum pemerintah daerah Kab/kota dapat tercatat dan teregister</p>	- Kabag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda surat masuk/keluar Bagian hukum dan HAM - Buku Agenda Raperda dan Perda Kab/Kota - Buku Agenda Keputusan/Peraturan Bupati/ Walikota

			<p>untuk tata kelola peraturan daerah kab/kota yang baik</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang diregister dibanding dengan jumlah perda kab/kota yang di mohonkan untuk di register dikali 100 persen 		
3.	Terlaksananya Pendokumentasian dan penyebaran informasi Peraturan Perundang-undangan di Kalimantan Selatan	Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini merupakan wujud nyata perluasan dan penyebaran informasi dengan didukung oleh tata kearsipan yang baik dan profesional terhadap pengelolaan pedokumentasian dan publikasi peraturan perundang undangan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Dengan memilih indikator ini diharapkan dapat mengetahui jumlah produk hukum yang telah terdokumentasi, tersimpan dan tersebar ke seluruh pemakai informasi tentang peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penganduh dokumen JDIH dibagi pengunjung website JDIH Prov. Kalsel dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Hukum - Lembaran Daerah - CD dok Hukum - Draft Produk Hukum

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Yang Meliputi Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur.

(KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Tercapainya Mutu Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase produk hukum daerah yang telah diharmonisasi/dikoreksi guna menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kaidah, asas dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator ini mencerminkan kesesuaian antara rancangan Produk Hukum Daerah dengan kaidah, asas dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase perbandingan antara Jumlah Rancangan produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Stake Holder <p>Raperda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Propemperda; dan - Surat Gubernur kepada DPRD perihal Penyampaian Raperda. <p>Produk Hukum Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan koreksi dari SKPD; dan - Nota dinas/surat hasil koreksi dari Biro Hukum kepada SKPD.

			daerah yang dimohonkan harmonisasi/koreksi dengan jumlah rancangan produk hukum yang telah berhasil diharmonisasi.		
2	Menurunnya Produk Hukum Daerah Yang Menghambat Pembangunan Dan Meningkatkan Simplifikasi Regulasi	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poroduk hukum daerah prov kalsel yang menghambat iklim investasi, menghambat pelayanan publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya terhadap pelaku kegiatan usaha tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bertentangan dengan kepentingan umum. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Merupakan indikator yang mencerminkan pemerintah provinsi kalsel yang peduli akan tatanan peraturan perundangan-undangan daerah yang saling bersinergi dan berkesinambungan satu dan lainnya.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk hukum daerah provinsi kalsel (Raperda/Perda) yang menghambat iklim investasi, menghambat pelayanan publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya pelaku usaha, tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan serta berbenturan dengan kepentingan umum, dibanding jumlah produk hukum daerah (Raperda/Perda) provinsi kalsel kemudian dikali 100 %. - Jumlah produk hukum daerah lainnya provinsi kalsel (Pergub/Kepgub) yang menghambat iklim investasi, menghambat pelayanan publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya pelaku kegiatan usaha, tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan serta berbenturan dengan kepentingan umum dibanding jumlah produk hukum daerah lainnya (Pergub/Kepgub) provinsi kalsel kemudian dikali 100 %. 	- Kabag. Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Stake Holder</i> - Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel - Arsip dan Dokumen Produk Hukum
		Laporan Hasil Kajian Produk Hukum Prov. Kalsel	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poroduk hukum daerah prov kalsel yang menghambat iklim investasi, menghambat pelayanan publik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghambat perizinan, membebankan berbagai tarif khususnya terhadap pelaku kegiatan usaha tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bertentangan dengan kepentingan umum. 	- Kabag Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Stake Holder</i> - Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel - Arsip dan Dokumen Produk Hukum

			<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator yang mencerminkan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang peduli akan tatanan peraturan perundangan-undangan daerah yang saling bersinergi dan berkesinambungan satu dan lainnya.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi laporan hasil simplifikasi produk hukum daerah provinsi Kalimantan Selatan. 		
--	--	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA ESELON IV BIRO HUKUM SETDA PROV. KALSEL

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Memberikan Bantuan Dan Perlindungan Hukum Kepada Unsur Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Kedinasan.

(KEPALA SUB BAGIAN PERLINDUNGAN HUKUM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Tertanganinya gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang telah dikuasakan	- Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Pertama	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan di pengadilan kepada <i>stake holder</i> yang telah dikuasakan ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan di pengadilan; dan - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> masuk/dikuasakan meminta upaya hukum ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan di pengadilan. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bahan, data, informasi dan masukkan bahwa adanya gugatan terhadap <i>stake holder</i>, merupakan bentuk adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan. Karena itu perlu untuk mengantisipasi dalam menghadapi hal tersebut.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan di pengadilan terhadap <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan ditangani pada tingkat pertama di pengadilan yang di menangkan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Linkum - <i>Stake Holder</i> 	<i>Stake Holder</i> yang terkait gugatan

			- Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan ditangani pada tingkat pertama di pengadilan yang di menangkan.		
		- Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Banding	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat banding ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan di pengadilan. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bahan, data, informasi dan masukkan apabila dalam putusan gugatan pada tingkat pertama kalah, maka akan dilakukan upaya hukum selanjutnya pada tingkat banding, merupakan bentuk adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan. Karena itu perlu untuk mengantisipasi dalam menghadapi hal tersebut.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat banding di pengadilan yang di menangkan. 	- Ksb. Linkum - <i>Stake Holder</i>	<i>Stake Holder</i> yang terkait gugatan
		- Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Kasasi	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat kasasi ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan di pengadilan. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bahan, data, informasi dan masukkan apabila dalam putusan gugatan pada tingkat banding kalah, maka akan dilakukan upaya hukum selanjutnya pada tingkat kasasi, merupakan bentuk adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan. Karena itu perlu untuk mengantisipasi dalam menghadapi hal tersebut.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat kasasi di pengadilan yang di menangkan. 	- Ksb. Linkum - <i>Stake Holder</i>	<i>Stake Holder</i> yang terkait gugatan
		- Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK)	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat Peninjauan Kembali ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan di pengadilan. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bahan, data, informasi dan masukkan apabila dalam putusan</p>	- Ksb. Linkum - <i>Stake Holder</i>	<i>Stake Holder</i> yang terkait gugatan

			<p>gugatan pada tingkat kasasi kalah, maka akan dilakukan upaya hukum selanjutnya pada tingkat peninjauan kembali, merupakan bentuk adanya persamaan hak atas kedudukan dalam pemerataan hukum dan keadilan. Karena itu perlu untuk mengantisipasi dalam menghadapi hal tersebut. Dalam hal ini adalah keputusan final (inckrah)</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gugatan <i>stake holder</i> yang masuk/dikuasakan dengan upaya hukum pada tingkat peninjauan kembali di pengadilan yang di menangkan. 		
2.	Meningkatnya Pengawasan dan pembinaan penanganan perkara di pengadilan lingkup Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan hasil monitoring penanganan Perkara di pengadilan di provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data, informasi dan dokumen laporan hasil penanganan perkara di pengadilan di provinsi dan kabupaten/kota di kalimantan selatan <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Jumlah tersebut mencerminkan terlaksananya penyelesaian permasalahan penanganan perkara di pengadilan di provinsi dan kabupaten/kota di kalsel sebagai bahan rekomendasi.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total bahan evaluasi penanganan perkara di Pengadilan di provinsi dan kabupaten/kota di kalsel yang dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi. 	- Ksb. Lingkum	Hasil Monitoring di pengadilan di provinsi dan kabupaten/kota di kalsel
3..	Tertanganinya bantuan hukum masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase advice permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang diteruskan ke OBH 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui OBH <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum di kalsel</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara masyarakat miskin yang diteruskan ke OBH dibanding permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang masuk ke Biro Hukum kemudian dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Linkum - Kanwil Hukum dan HAM - Kejati Kalsel 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tata Usaha Negara - Organisasi Bantuan Hukum

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Mengumpulkan Bahan Penanganan Sengketa Hukum Sebagai Akibat Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Serta Pemasyarakatan HAM

(KEPALA SUB BAGIAN SENKETA HUKUM DAN HAM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1	Tercapainya mutu legal drafting kesepakatan bersama ,perjanjian kerjasama dan NPHD yang sesuai ketentuan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah dan diselesaikan 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukannya pengkajian dan penelaahan terhadap, kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD, sehingga materi dan muatannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga selesai dan diterima SKPD Pemrakarsa. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Mencerminkan tingkat kesesuaian dengan kaidah peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PKS (Perjanjian Kerjasama), MoU dan NPHD lain yang telah ditelaah ,dikoreksi dan diharmonisasi dan di selesaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM - Ksb. Sengketa Hukum dan HAM - SKPD Pemrakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Koreksi Ksb. PKS, dan NPHD
2	Asistensi penyelesaian non litigasi di lingkungan Pemprov Kalsel	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah asistensi Non litigasi di lingkungan Pemprov. Kalsel 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditindaklanjuti aduan sengketa yang dimaksud adalah didapatinya solusi terhadap penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilaporkan kepada pemprov. Kalimantan Selatan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Jumlah sengketa hukum yang tidak dapat diprediksi pada setiap tahun berjalan, sehingga kinerja pembahasan berdasarkan permohonan perkara/gugatan/aduan yang masuk.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aduan/perkara/gugatan yang berhasil ditindak lanjuti dalam rangka penyelesaian sengketa Hukum di luar pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Biro Hukum - Kabag. Bantuan Hukum dan HAM - Ksb. Sengketa Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Asistensi Sengketa Hukum
3	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang Bantuan Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Work Shop Bantuan Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥80 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paham yang dimaksud adalah mengerti secara yuridis maupun teknis tentang persamaan persepsi pengetahuan dan persamaan persepsi bantuan hukum daerah <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Melalui indikator ini dimaksudkan agar adanya pemajuan secara teknis dan yuridis dinamika bantuan hukum daerah di Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang paham workshop Bantuan Hukum Daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Sengketa Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap Hasil Post Tes Work Shop Bantuan Hukum Daerah

			nilai post testnya ≥ 80 poin		
4	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan lingkup Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel	- Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan yang diterima	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data berupa dokumen lap. Hasil Penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan pada Prov. Kalimantan selatan dan Kab/kota. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Jumlah tersebut mencerminkan terlaksananya penyelesaian permasalahan sengketa hukum di luar pengadilan yang ada di Provinsi kalimantan Selatan dan Kab/Kota</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total bahan evaluasi Penyelesaian Sengketa hukum di luar Pengadilan di Provinsi dan Kab/Kota di Kalsel. 	- Ksb. Sengketa Hukum dan HAM	- Hasil Monitoring
5	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan RANHAM dan penilaian kriteria Kab/kota peduli HAM	- Jumlah Dokumen Penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM yang terverifikasi	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dimaksud adalah dokumen laporan yang sudah mendapatkan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Merupakan wujud nyata melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia pada Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota Peduli HAM</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan RANHAM dan jumlah Kab/Kota yang mendapat predikat Kab/Kota peduli HAM oleh Kemenkumham RI 	- Ksb. Sengketa Hukum dan HAM	- Laporan Aksi HAM Prov. Kalsel - Data Penilaian Kab/Kota Peduli HAM
6.	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Hak Asasi Manusia di Kalimantan Selatan	- Jumlah Peserta Workshop HAM yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia saat kembali kepada organisasi dan lingkungan masing-masing. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Adanya update pengetahuan secara berkala terhadap peserta tentang hak asasi manusia baik dalam aspek yuridis dan teknis.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta workshop HAM yang lulus post tes dengan nilai ≥ 80 	- Ksb. Sengketa Hukum dan HAM	- Rekap Hasil Post Tes Workshop HAM

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melakukan Kegiatan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian Dan Rumah Tangga Biro.

(KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	- Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercatatnya dan terdistribusinya surat menyurat Biro Hukum <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Tata kelola kearsipan dan surat menyurat merupakan salah satu rangkaian komunikasi birokrasi antar setiap instansi. Untuk itu perlu dilakukan pencatatan dan pengarsipan serta tata kelola kedinasan yang baik.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total surat menyurat yang masuk dan tercatat pada satu periode tahun berjalan - 	- Ksb.Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda Surat Menyurat Biro Hukum - Arsip Surat Biro Hukum
		- Jumlah aset yang tercatat	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercatatnya aset biro hukum <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Pengelolaan aset merupakan salah satu bagian dari pelaporan keuangan tahunan, yang menjadi tolak ukur dalam penilaian laporan keuangan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kartu invnetaris barang yang sesuai dengan kondisi aset biro hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Tata Usaha - Pengurus Penyimpan Barang 	- Kartu Inventaris Barang
		- Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen aset yang sesuai kaidah yang tercatat baik secara komputerisasi maupun secara manual <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Setiap aset pada Biro Hukum hars tercatat dengan baik sesuai kaidah pencatatan aset</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah mutasi asset pada tahun berjalan. 	- Ksb.Tata Usaha	- Data Dan Arsip Pegawai

2.	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja Biro Hukum	- Nilai komponen pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Biro Hukum	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komponen pelaporan pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan sejauh mana komponen pelaporan sudah tersusun dengan baik. <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian komponen pelaporan pada Laporan Hasil Evaluasi 	- Ksb.Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Dok Yang Terkait Pelaporan - Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		- Nilai komponen perencanaan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Biro Hukum	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komponen perencanaan pada laporan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Menunjukkan sejauh mana komponen perencanaan sudah tersusun dengan baik</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian komponen perencanaan pada laporan hasil evaluasi 	- Ksb.Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Dok Yang Terkait Perencanaan - Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		- Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur dokumen kinerja pada biro hukum yang sesuai ketentuan <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Mendukung penilaian pada indikator lain diatas</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kinerja. 	- Ksb.Tata Usaha	- Dokumen Kinerja Biro Hukum
3	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan Biro Hukum	- Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang terkait dengan laporan keuangan tahunan maupun permintaan dokumen oleh instansi terkait. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Kewajiban setiap SKPD untuk melaporkan kinerjanya melalui pelaporan keuangan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan keuangan yang sesuai ketentuan. 	- Ksb.Tata Usaha	- Laporan Keuangan Biro Hukum
4.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi	- Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Biro Hukum harus mendapatkan pelayanan yang baik menyangkut hak-hak sebagai pegawai. 	- Ksb.Tata Usaha	- Dokumen Setiap Pegawai Biro Hukum

	kepegawaian	dilayani secara tertib.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Wujud pelayanan pada karyawan dan rekan sejawat terhadap hak-hak mereka.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator: - Jumlah pegawai biro hukum yang dipenuhi hak-hak kepegwaiannya.</p>		
5.	Terpenuhinya koleksi buku tentang Hukum	- Jumlah pembelian dokumen hukum	<p>Makna Indikator: - Buku yang berkaitan tidak hanya tentang hukum tetapi juga hal lain tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Yang akan membuka dan menambah wawasan ASN Biro Hukum</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui jumlah buku yang dibeli sesuai dengan anggaran yang tersedia</p> <p>Cara Penghitungan Indikator: - Total pembelian buku tentang hukum dan tata kelola pemerintahan.</p>	- Ksb.Tata Usaha	- Buku Tentang Hukum Maupaun Pemerintahan

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Menyiapkan Data Dan Bahan Guna Penyusunan Peraturan Daerah Dan Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah.

(KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN PERATURAN DAERAH)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang produk hukum daerah Provinsi Kalsel	- Jumlah Peserta Workshop Produk Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paham artinya mengerti dan memahami baik dari sisi yuridis maupun teknis makna dari pengaturan peraturan daerah. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Melalui indikator tersebut diharapkan setiap peserta sosialisasi yang telah memahami dapat menerapkan ketentuan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang paham workshop produk hukum daerah yang nilai post tesnya ≥ 80 	- Ksb. Perumusan Perda	- Rekap Hasil Post Test Workshop Produk Hukum Daerah
		- Jumlah Perda yang disosialisasikan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tersebut dimaknai sebagai target kegiatan yang telah ditetapkan sesuai anggaran yang tersedia. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tersebut mencerminkan kesesuaian antara yang direncanakan dengan pelaksanaan kegiatan. <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total jumlah Perda yang disosialisasikan 	- Ksb. Perumusan Perda	- Laporan Hasil Sosialisasi
2	Terpenuhinya peraturan daerah yang sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.	- Prosentase Raperda yang diterima DPRD	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raperda yang diterima legislatif artinya raperda tersebut telah melalui proses pengkajian/penelaahan sehingga materi muatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dengan peraturan daerah lain, yang kemudian hasil dari draft tersebut disampaikan oleh Gubernur ke DPRD. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator tersebut mencerminkan keberhasilan dalam merealisasikan usulan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Raperda yang telah diterima oleh DPRD dibanding jumlah 	- Ksb. Perumusan Perda	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur Tentang Propemperda; dan - Surat Gubernur Kepada DPRD Perihal Penyampaian Raperda Dan Tanda Terima Dari DPRD Prov. Kalsel.

			yang diusulkan dalam propemperda dikali 100 %		
--	--	--	---	--	--

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Untuk Melaksanakan Tugas Mengumpulkan Bahan Telaahan, Analisis, Dan Pertimbangan Guna Penyusunan Peraturan Daerah Dan Keputusan Gubernur.

(KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN PRODUK HUKUM LAINNYA)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Tercapainya mutu legal drafting produk hukum daerah lainnya (Pergub/Kepgub) yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	- Jumlah produk hukum daerah lainnya Pemprov. Kalsel yang telah diharmonisasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya mutu produk hukum lain yang diharmonisasi, sehingga mutu hasil koreksi yang mulanya berupa draft yang belum sesuai ketentuan telah sesuai dengan kaidah perumusan peraturan perundang-undangan. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Mencerminkan tingkat kesesuaian antara produk hukum daerah lainnya dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk hukum daerah lainnya (Pergub/Kepgub) yang proses pembuatannya pada tahun berjalan, yang diharmonisasi dibanding dengan jumlah seluruh permohonan harmonisasi produk hukum daerah lainnya (Pergub/Kepgub) yang proses pembuatannya pada tahun berjalan yang diserahkan ke Biro Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Perumusan Produk Hukum Lainnya - SKPD Pemrakarsa 	- Draft Permohonan Koreksi Pergub/Kepgub

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Untuk Melaksanakan Tugas Melakukan Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah Dan Melakukan Simplifikasi Atas Produk Hukum Daerah Tersebut Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(KEPALA SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
----	---------------	-------------------	------------	------------------	-------------

1.	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel	- Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel yang di simplifikasi	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan dalam melaksanakan simplifikasi Perda dan Perkada. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Sesuai dengan amanat nasional tentang perlunya penyerdehanaan dalam regulasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel Perda dan Perkada yang dikaji. 	- Ksb Pengkajian Produk Hukum	- Telaahan Pengkajian Produk Hukum - Laporan Hasil Rapat
2.	Terinventarisasi Regulasi dan teridentifikasinya masalah produk hukum daerah provinsi Kalsel	- Jumlah produk hukum daerah Provinsi Kalsel yang siap dikaji	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan dalam melaksanakan simplifikasi Perda dan Perkada. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Sesuai dengan amanat nasional tentang perlunya penyerdehanaan dalam regulasi produk hukum daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk hukum daerah yang terinventarisasi untuk ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas. 	- Ksb Pengkajian Produk Hukum	- Telaahan Pengkajian Produk Hukum - Laporan Hasil Rapat Asistensi Pengkajian Produk Hukum
3.	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang Pengkajian Produk Hukum di Provinsi Kalsel	- Jumlah Peserta Workshop Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paham artinya mengerti dan memahami baik dari sisi yuridis maupun teknis terhadap pengkajian produk hukum daerah oleh SKPD di lingkup pemprov kalsel. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Melalui indikator tersebut diharapkan setiap peserta bimbingan teknis/sosialisasi yang telah memahami dapat menerapkan ketentuan peraturan daerah dalam menjadikan dasar dan patokan dalam proses pengkajian produk hukum yang harus di kaji dan ditindaklanjuti yang kemudian disimplifikasi.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang paham workshop Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80 	- Ksb Pengkajian Produk Hukum	- Rekap Hasil Post Test Workshop Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan Inventarisasi Dan Evaluasi Dan Fasilitasi Terhadap Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Dan Kota Wilayah I.

(KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN FASILITASI WILAYAH I)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Kesesuaian Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada wilayah I dengan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota wilayah I yang berhasil dievaluasi dan difasilitasi 	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberhasilan melakukan Evaluasi dan Fasilitasi Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Fasilitasi Wilayah I, menunjukkan bahwa Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada Wilayah I (Kab. HSS, HSU, HST, Tapin, Tabalong dan Balangan) yang proses pembuatannya pada tahun berjalan, yang berhasil difasilitasi, dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Evaluasi Dan Fasilitasi. Wilayah I 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Hasil Evaluasi - Surat Fasilitasi - Buku Agenda Penerimaan
2.	Inventarisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kab/Kota Wilayah I di Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I yang terinventarisasi dan teregistrasi	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk Hukum Kabupaten/Kota Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I di Prov. Kalsel perlu dilakukan pengawasan secara kontinu dengan cara terus di inventarisasi dan tercatat dalam registrasi evaluasi dan fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalsel <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Dengan adanya indikator tersebut dimaksudkan agar seluruh produk hukum pemerintah daerah Kab/kota dapat tercatat dan teregister untuk tata kelola peraturan daerah kab/kota yang baik</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota pada cakupan Wilayah I yang diregister dibanding dengan jumlah perda kab/kota yang di mohonkan untuk di register 	<ul style="list-style-type: none"> - Ksb. Eva dan fas. Wil I 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda surat masuk/keluar Bagian hukum dan HAM - Buku Agenda Raperda dan Kab/Kota - Buku Agenda Keputusan/Peraturan Bupati/ Walikota
3	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi PERDA Kab/Kota dan Perbup/Perwali wilayah I	Jumlah PERDA Kab/Kota, Perbup/Perwali yang telah ditindak lanjuti oleh Kab/Kota wilayah I	<p>Makna Indikator:</p> <p>Jumlah Kab/kota yg dimonitor dalam hal evaluasi dan fasilitasi perda dan Perbup/perwalikab/kota.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Perda dan perbup/perwali harus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag evaluasi dan fasilitasi wil I 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap perda dan perbup/perwali kab/kota

			Cara Penghitungan Indikator: Jumlah Perda dan perbup/perwali kab/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		
4	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi Pengawasan Kebijakan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Pengawasan Kebijakan Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	Makna Indikator: - Paham artinya mengerti dan memahami baik dari sisi yuridis maupun teknis makna dari pengaturan peraturan daerah. Alasan Pemilihan Indikator: Melalui indikator tersebut diharapkan setiap peserta sosialisasi yang telah memahami dapat menerapkan ketentuan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD. Cara Penghitungan Indikator: - Jumlah peserta yang paham workshop produk hukum daerah yang nilai post tesnya ≥ 80	- Kabag. Evaluasi dan Dokumentasi Hukum - Ksb. Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah I	- Rekap Hasil Post Test Workshop Pengawasan Kebijakan Daerah

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan Inventarisasi Dan Evaluasi Dan Fasilitasi Terhadap Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Dan Kota Wilayah II.

(KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN FASILITASI WILAYAH II)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	kesesuaian Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada wilayah II dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada wilayah II yang berhasil dievaluasi dan difasilitasi	Makna Indikator: - Keberhasilan melakukan Evaluasi dan Fasilitasi Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Fasilitasi Wilayah I, menunjukkan bahwa Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Cara Penghitungan Indikator: - Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada Wilayah II (Kab. Kotabaru, Tanah Bumbu, Tala, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Batola) yang proses pembuatannya pada tahun berjalan, yang berhasil di evaluasi dan di fasilitasi.	- Kasubbag Evaluasi dan Fasilitasi wil II	- Keputusan Hasil Evaluasi - Surat Fasilitasi - Buku Agenda Penerimaan
2.	Inventarisasi Peraturan Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah	Makna Indikator: - Produk Hukum Kabupaten/Kota Produk Hukum Daerah Kab/Kota	- Kasubbag Evaluasi dan	- Buku Agenda surat masuk/keluar Bagian hukum

	Kab/Kota Wilayah II di Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten/Kota wilayah II yang terinventarisasi dan teregistrasi	<p>Wilayah II di Prov. Kalsel perlu dilakukan pengawasan secara kontinu dengan cara terus di inventarisasi dan tercatat dalam registrasi evaluasi dan fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalsel</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Dengan adanya indikator tersebut dimaksudkan agar seluruh produk hukum pemerintah daerah Kab/kota dapat tercatat dan teregister untuk tata kelola peraturan daerah kab/kota yang baik</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota pada cakupan Wilayah II yang diregister dibanding dengan jumlah perda kab/kota yang di mohonkan untuk di register 	Fasilitasi wil II	<p>dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda Raperda dan Perda Kab/Kota - Buku Agenda Keputusan/Peraturan Bupati/ Walikota
3	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi PERDA Kab/Kota dan Perbup/Perwali wilayah II	Jumlah PERDA Kab/Kota, Perbup/Perwali yang telah ditindak lanjuti oleh Kab/Kota wilayah II	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kab/kota yg dimonitor dalam hal evaluasi dan fasilitasi perda dan Perbup/perwalikab/kota. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Perda dan perbup/perwali harus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesesuaian.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perda dan perbup/perwali kab/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 	- Kasubbag Evaluasi dan Fasilitasi wil II	- Rekap perda dan perbup/perwali kab/kota

Instansi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tugas : Melakukan Dokumentasi Dan Publikasi Produk-Produk Hukum.

(KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Tertibnya pendokumentasian Dokumen hukum	Jumlah dokumen hukum yang terdokumentasi dengan baik	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdokumentasikannya produk hukum yang baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <p>Alasan Pemilihan Indikator: Pendokumentasian produk hukum akan memudahkan dalam proses</p>	- Ksb. Dokumentasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaran Daerah - CD dok. Hukum - Website JDIH

			<p>pengambilan data dan pengelolaan yang berkaitan dengan produk hukum.</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen hukum yang telah di catat dan di dokumentasikan kedalam Arsip Biro hukum 		
2.	Meningkatnya pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan agar tertib dalam pengelolaan JDIIH	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya pembinaan terhadap jaringan dokumentasi dan informasi hukum terhadap kab/kota dalam pengelolaan dokumentasi hukum <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Perlu adanya pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan pengelolaan yang baik berstandar nasional</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dan tertib dalam pengelolaan JDIIH 	- Ksb. Dokumentasi Hukum	- Laporan Hasil motoring ke daerah
3.	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang JDIIH	Jumlah Peserta Workshop JDIIH yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	<p>Makna Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan mengerti tentang tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, makna paham adalah peserta yang memenuhi syarat minimal nilai post test ≥ 80. <p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Agar dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum didukung dengan sumber daya manusia yang trampil, mengerti teknis tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum</p> <p>Cara Penghitungan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mendapat poin ≥ 80 pada Bimtek/sosialisasi JDIIH dibanding dengan jumlah peserta Bimtek/sosialisasi JDIIH kemudian dikali 100 % 	- Ksb. Dokumentasi Hukum	- Laporan Hasil Bimtek/Sosialisasi - Kuisioner

Banjarbaru, September 2017
Mengetahui,
Kepala Biro Hukum,

A. Fydayeen, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
19700202 199603 1 002